

**Analisa Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan UMK  
Terhadap Jumlah Industri Kecil Menengah di DIY**

**Tahun 2011-2016**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Fauzi Rachman Ramadhan  
Nomor mahasiswa : 14313118  
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2018**



FORM REVIEW JURNAL PUBLIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

Nama Mahasiswa : **FAUZI RACHMAN RAMADHAN**  
No. Mahasiswa : **14313118**

Penelitian:

**ANALISA PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, DAN UMK TERHADAP JUMLAH IKM DI  
DIY TAHUN 2011-2016**

Naskah Publikasi telah di review oleh Tim Penguji pada tanggal, 13 April 2018 dengan hasil <sup>\*)</sup>:

1. Layak dipublikasikan tanpa perbaikan
2. Layak dipublikasikan dengan perbaikan
3. Tidak layak dipublikasikan

Penguji,

Rindang Nuri Isnaini N., SE., M.E.K.

Pembimbing,

Suharto, SE., M.Si.

Telah direvisi/diperbaiki tanggal : .....

*26/4/18*

Penguji,

Rindang Nuri Isnaini N., SE., M.E.K.

Pembimbing,

Suharto, SE., M.Si.

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

# **ANALISA PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, DAN UMK TERHADAP JUMLAH IKM DI DIY TAHUN 2011-2016**

**FAUZI RACHMAN RAMADHAN**

**SUHARTO ,.S.E.,M.Si.**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

EMAIL : fauzirr7@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh produk domestik bruto, jumlah penduduk, dan upah minimum kabupaten terhadap jumlah industri kecil menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Model analisis yang digunakan adalah alat analisis data panel sebagai alat pengolahan data. Dimana data panel merupakan kombinasi antara deret waktu (time series) yaitu dari tahun 2011-2016 dan kerat lintang (cross-section) yaitu lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uji statistik yang digunakan terdapat tiga model analisis regresi yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Hasil dari analisis data menunjukkan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah industri kecil menengah di DIY. Dimana semakin tinggi PDRB maka jumlah industri kecil menengah akan semakin menurun. Kemudian analisis data jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah industri kecil menengah, maka ketika terjadi penurunan jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi jumlah industri kecil menengah di DIY. Sedangkan variabel terakhir yaitu upah minimum kabupaten menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap jumlah industri kecil menengah, sehingga dengan upah yang meningkat maka jumlah industri kecil menengah cenderung akan meningkat.*

**Keywords** : PDRB, Jumlah Penduduk, UMK.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah suatu konsep yang luas, maka dalam pembangunan akan mencakup modernisasi lembaga baik yang bersifat ekonomi maupun yang bukan ekonomi, seperti pemerintah, kota, desa, dan cara berpikir, tidak saja yang berkenaan dengan tujuan agar dapat membangun secara rasional dan hidup lebih baik. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing, sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangga (Wiratno, 2010). Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah propinsi memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa lebih mandiri.

Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah provinsi harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki.

Untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah akan diikuti atau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin (Prihatmo, 2001). Pertumbuhan ekonomi itu sendiri didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa atau daerah dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Atau dapat diartikan juga sebagai perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita). PDRB adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor atau lapangan usaha di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya dari wilayah tersebut, merupakan produk domestik regional yang bersangkutan (Wiratno, 2010).

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa total PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di DIY mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Salah satu contoh pada tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 110.126.675 (Juta Rupiah) dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya mencapai 65.256.811 (Juta Rupiah). Itu berarti terdapat peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan lapangan usaha. Tidak dapat dipungkiri lagi peningkatan lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa menjadi indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.1 PDRB Tahun 2011-2016 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar  
Harga Berlaku DIY**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yogyakarta	12.962.43 5	14.327.5 64	22.537.7 92	24.664.2 85	26.792.6 41	28.915.7 81
Sleman	23.764.36 6	25.732.2 48	28.295.3 62	31.013.8 93	33.826.5 05	36.991.4 15
Bantul	13.290.66 6	14.510.8 32	16.138.7 55	17.682.9 24	19.325.2 03	20.924.9 70
Kulonprogo	5.500.250	5.916.57 4	6.489.55 3	7.056.57 1	7.671.54 8	8.312.45 4
Gunung kidul	9.739.094	10.545.3 54	11.530.3 40	12.557.3 71	13.798.6 56	14.982.0 55

Sumber : BPS DIY

Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2016 memiliki populasi 3.689.869 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk DIY Tahun 2011-2016**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yogyakarta	390.554	394.012	402.679	400.467	412.704	410.262
Sleman	1107304	1.114.8 33	1.107.30 4	1.163.97 0	1.167.48 1	1.180.47 9
Bantul	921.263	930.276	955.015	968.632	971.511	931.356
Kulonprogo	393.796	391.436	403.179	407.709	412.198	445.293
Gunungkidul	685.003	692.579	700.191	707.794	715.282	722.479

Sumber: BPS DIY

Dalam menjalankan bisnis atau perusahaan baik yang besar, menengah ataupun kecil tidak lepas dari peran tenaga kerja. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja merupakan bagian penting dalam menentukan berjalannya suatu perusahaan dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Untuk memperoleh tenaga kerja suatu perusahaan harus mengorbankan penambahan pengeluaran yaitu berupa upah sebagai imbalan dasar (*basic salary*) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

**Tabel 1.3. Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2011-2016**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011*</b>	<b>2012*</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yogyakarta	808.000	892.660	1.065.247	1.173.300	1.302.500	1.452.400
Sleman	808.000	892.660	1.026.181	1.127.000	1.200.000	1.338.000
Bantul	808.000	892.660	993.484	1.125.500	1.163.800	1.297.700
Kulonprogo	808.000	892.660	954.339	1.069.000	1.138.000	1.268.870
Gunungkidul	808.000	892.660	947.114	988.500	1.108.249	1.235.700

. Sumber: Disnakertrans DIY

\*SK GUBERNUR NO.370/KEP/2012 Tentang UMK Kabupaten/Kota di DIY tertanggal 20 November 2012. Penerapan UMK di seluruh wilayah DIY akan dimulai pada 1 Januari 2013

Kendati untuk melindungi pekerja atau buruh dari kesewenangan pengusaha yang memberikan upah tidak layak serta untuk mendorong peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, maka perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan upah minimum. Penetapan upah sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang upah minimum. Tingkatan upah minimum yang ditetapkan juga menjadi penentu bagi keberlangsungan suatu industri baik yang kecil maupun menengah. Dimisalkan, apabila upah minimum provinsi naik berkisar 40% - 60% maka industri ini akan mati karena tidak ada yang mau membayar sejumlah itu.

**Tabel 1.4. Data Pertumbuhan Industri Kecil Menengah DIY Tahun  
2011-2016**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Yogyakarta	3.994	4.183	4.708	5.133	5.279	5.499
Sleman	16.243	16.771	16.983	17.353	16.983	17.710
Bantul	18.555	18.885	19.246	19.811	20.423	20.980
Kulonprogo	21.104	21.018	22.263	22.543	23.188	23.820
Gunungkidul	20.151	20.658	21.034	21.247	21.872	22.897

Sumber: DISPERINDAG DIY

Data pertumbuhan Industri Kecil Menengah DIY tahun 2011-2016 mengalami pertumbuhan akan tetapi tidak signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Industri Kecil Menengah di DIY dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan sebesar 10.859 unit atau naik sekitar 8,8%. Usaha tersebut meliputi usaha pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, dan kerajinan.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Maharani (2008), melakukan penelitian tentang “Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Pada krisis tahun 1997 di Indonesia, UKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional.

Hal ini dikarenakan UKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UKM setiap tahunnya. Pada tahun 2011 jumlah unit UKM sebanyak 54,8 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada lima tahun terakhir UKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja (BPS, 2013). Posisi tersebut menunjukkan bahwa UKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian. Akan tetapi disisi lain, terdapat hambatan internal dan eksternal dari UKM. Sehingga hal tersebut mengakibatkan produktivitas UKM sangat

rendah dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini dapat terlihat dari sumbangsuhnya terhadap PDB yang belum cukup tinggi. Meskipun secara unit usaha merupakan usaha yang dominan di Indonesia, akan tetapi sektor ini masih kalah bersaing dengan usaha besar yang jumlahnya sangat sedikit.

Prihatmo (2001), melakukan penelitian tentang “Analisa Potensi Produk Domestik Regional Bruto di Kota Yogyakarta”. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu dilihat secara global, karena cara tersebut kurang dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari perekonomian yang bersangkutan. Untuk lebih cermatnya analisis dan kebijakan, maka perekonomian perlu dilihat secara lebih terperinci, yaitu dikelompokkan dalam sektor-sektor kegiatan usaha. Disadari bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah harus berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional, tetapi harus diingat juga bahwa pemerintah daerah mampu memberikan sumbangan terhadap pertimbangan regional tersebut sesuai dengan penglihatan daerah.

Permadi (2009) , melakukan penelitian tentang Analisa PDRB dan Total Kredit Terhadap Jumlah Unit Usaha Kecil Menengah. Dalam penelitiannya, PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah usaha kecil menengah. PDRB menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi dan mempunyai korelasi positif terhadap meningkatnya jumlah unit usaha kecil menengah.

Untuk itu pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah di daerahnya masing-masing. Perencanaan daerah merupakan proses yang mempunyai manfaat besar dalam meningkatkan PAD. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, antara lain ditempuh dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada intinya dalam penelitian ini menekankan bagaimana peranan dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang diuraikan menurut sektor-sektor kegiatan ekonominya.



Menurut, Sandhika (2010), dalam penelitian yang dilakukannya di Kabupaten Kendal dengan variabel penelitian Konglomerasi, tenaga kerja, jumlah penduduk, dan modal untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan kesimpulan salah satunya adalah variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dalam penelitiannya dijelaskan bahwasannya kondisi itu terjadi dikarenakan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang memadai sehingga berakibat rendahnya produktivitas.

Disadari bahwa seluruh kegiatan pembangunan daerah harus berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional, tetapi harus diingat juga bahwa pemerintah daerah mampu memberikan sumbangan terhadap pertimbangan regional tersebut sesuai dengan penglihatan daerah. Untuk itu pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah di daerahnya masing-masing. Perencanaan daerah merupakan proses yang mempunyai manfaat besar dalam meningkatkan PAD.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, antara lain ditempuh dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada intinya dalam penelitian ini menekankan bagaimana peranan dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto yang diuraikan menurut sektor-sektor kegiatan ekonominya.

Menurut, Widyastuti (2013), dalam penelitiannya “Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah”. Pada industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam penyerapan tenaga kerja yang cenderung fluktuasi dan laju pertumbuhannya negatif di beberapa tahun. Jumlah Unit Usaha mengalami kenaikan dan penurunan, begitu pula dengan permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah. Demikian halnya dengan nilai upah minimum yang cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya namun permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun. Kenaikan Upah

Minimum justru mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah (IKM).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dibuat atau dikumpulkan oleh orang lain yang digunakan penulis dalam kurun waktu tertentu. Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari Dinas Perindustrian Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag Prov. DIY), Disnakertrans DIY, dan BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam variabel dependen adalah IKM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan variabel independen adalah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan inflasi. Defnisi operasional variabel yang digunakan oleh penulis adalah :

Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun tidak lebih dari Rp 1 milyar.

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau jumlah seluruh nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu.

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. pencatatan atau peng-kategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan.

Upah minimum kabupaten (UMK) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya serta pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

## **METODE ANALISIS DATA**

Dalam analisis metode ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait yaitu jumlah IKM di DIY. Bila hubungan antar variabel ini dinyatakan dengan model matematika maka akan digunakan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \mu$$

$$Y_1 = \text{Jumlah IKM}$$

$$X_1 = \text{PDRB}$$

$$X_2 = \text{Jumlah Penduduk}$$

$$X_3 = \text{Upah Minimum Kabupaten (UMK)}$$

$$B_0 = \text{Konstanta}$$

$$\beta_1 \beta_2 \beta_3 = \text{Koefisien Regresi}$$

$$\mu = \text{Variabel Pengganggu}$$

Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu common effect, fixed effect, dan random effect.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Chow Test dan Uji Hausman***

*Chow Test* Fixed Effect menguji model regresi panel antara model Common dengan model Fixed Effect, sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih model antara Fixed Effect dengan model Random. Hasil uji Chow atau F test antara model Common dengan model Fixed Effect dapat ditunjukkan pada :

## Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	614.484224	(4,22)	0.0000
Cross-section Chi-square	141.748378	4	0.0000

Nilai distribusi statistik *Chi Square* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9.0* adalah sebesar 141.748378 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistik  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan model Fixed Effect dengan Random Effect dengan uji Hausman. Jika model terjadi perbedaan yang signifikan ( $\text{sig} < 0,05$ ) maka model yang tepat adalah Fixed Effect dan sebaliknya jika tidak ada perbedaan yang signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka model yang tepat adalah Random Effect.

Hasil uji Hausman dapat ditunjukkan pada :

## Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.464036	3	0.0060

Nilai distribusi statistik *Chi Square* dari perhitungan menggunakan *Eviews9.0* adalah sebesar 12.464036 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistik  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

### **Analisis Regresi Panel**

Setelah dilakukan pemilihan model regresi panel, ternyata model *Fixed Effect* merupakan model yang paling baik dalam pengujian pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Upah minimum kabupaten terhadap perkembangan IKM di Yogyakarta.

Dilihat dari hasil estimasi di atas diperoleh R-squared sebesar 0.998548 yang berarti variabel independen sebesar 99,8% mempengaruhi variabel dependent sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Dari persamaan regresi yang telah diperoleh maka dapat dibuat interpretasi terhadap model ataupun hipotesa yang telah diambil sebelumnya. Adapun hasil interpretasi adalah sebagai berikut:

1. PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY. Hal ini dapat dilihat dari koefisien  $X_1$  (PDRB) sebesar -0.000168 yang artinya bahwa setiap kenaikan PDRB satu juta akan mengakibatkan penurunan IKM sebesar -0.000168 (0,1 unit usaha). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal.
2. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah IKM di DIY. Hal ini dapat dilihat dari koefisien  $X_2$ /Jumlah penduduk sebesar -0.001333 yang artinya bahwa meningkatnya Jumlah penduduk tidak akan berpengaruh terhadap jumlah IKM. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal.
3. Upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY. Hal ini dapat dilihat dari koefisien  $X_3$ /UMK sebesar 0.007350 yang berarti setiap kenaikan jumlah UMK

satu juta rupiah akan mengakibatkan kenaikan jumlah IKM sebesar 0.007350 atau 7 unit usaha. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal.

### **Hasil Uji t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel Model fixed effect di atas. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan UMK, di DIY secara parsial terhadap jumlah Industri Kecil Menengah di DIY. Dengan membandingkan probabilitas t dengan nilai alpha 0,05 maka dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis.

#### **1. Pengaruh PDRB Terhadap Jumlah IKM**

Hasil perhitungan pada model Fixed Effect, variabel PDRB memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.000168 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0001 yang lebih kecil dari alpha 0,05 ( $0.0001 < 0,05$ ), maka dapat dinyatakan PDRB berpengaruh signifikan terhadap jumlah IKM. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY tidak dapat diterima atau tidak terbukti.

#### **2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah IKM**

Hasil perhitungan pada model *Fixed Effect*, variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.001333 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7390 yang lebih tinggi dari alpha 0,05 ( $0.7390 > 0,05$ ), maka dapat dinyatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah IKM. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY tidak dapat diterima atau tidak terbukti.

#### **3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah IKM**

Hasil perhitungan pada model *Fixed effect*, variabel upah minimum memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.007350 dan memiliki nilai

probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), maka dapat dinyatakan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap jumlah IKM. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY dapat diterima atau terbukti.

### Hasil Uji f

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat ditunjukkan pada tabel Model *Fixed Effect* di atas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, secara bersama-sama terhadap jumlah IKM di DIY. Dengan membandingkan probabilitas F dengan nilai alpha 0,05 maka dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, secara bersama-sama terhadap jumlah IKM di DIY.

**Tabel 4.6 Hasil Uji F**

Variabel	Probabilitas F
PDRB	0.000000
Jumlah Penduduk	
UMK	

Hasil perhitungan pada Model *Fixed Effect*, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 ( $0,000000 < 0,05$ ), maka dapat dinyatakan PDRB, jumlah penduduk, upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap jumlah IKM.

## **PEMBAHASAN**

### **PDRB**

Hasil penelitian menemukan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah IKM di Yogyakarta. Artinya ketika PDRB naik maka jumlah IKM di DIY akan turun. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “PDRB berpengaruh positif terhadap jumlah IKM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” ditolak. Penyebab penurunan industri kecil menengah ketika PDRB naik mungkin bisa disebabkan oleh adanya deindustrialisasi yang terjadi di DIY. Yang dimaksud dengan deindustrialisasi adalah menurunnya peran industri dalam perekonomian secara menyeluruh. Menurunnya peranan industri dalam perekonomian bisa dilihat dari berbagai sisi, misalnya turunnya pekerja di sektor industri, turunnya produk industri, alih teknologi, serta turunnya industri dibandingkan sektor lain. Penyebab lain dari deindustrialisasi adalah hilangnya keunggulan kompetitif dari sektor industri suatu negara maupun daerah. Jika keunggulan kompetitif produk industri suatu negara atau daerah hilang, maka produk negara maupun produk daerah tersebut akan kalah di pasar regional maupun internasional. Implikasinya, industri negara akan menurun dan pada akhirnya membuat investor menarik investasinya dari sektor industri ke sektor lain (Kuncoro, 2007). Hal ini mungkin yang terjadi dengan perkembangan industri kecil menengah di DIY, dalam penelitian ini ketika PDRB naik, jumlah industri kecil menengah justru akan menurun. Faktor alih teknologi mungkin yang menyebabkan menurunnya jumlah industri kecil menengah di DIY. Yang dimaksud dengan adanya alih teknologi adalah dikarenakan adanya perkembangan zaman yang semakin maju membuat produsen semakin berinovasi dengan menggunakan teknologi/mesin semakin canggih sehingga menggantikan tenaga kerja manusia dan menjadi lebih efisien.



## **JUMLAH PENDUDUK**

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan *fixed effect*. Dari hasil pengujian model *fixed effect* disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah IKM di DIY. Hal ini menggambarkan bahwa naik turunnya jumlah penduduk tidak berdampak pada jumlah IKM dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi tidak serta merta memilih peluang bisnis di sektor IKM, melainkan memilih peluang bisnis di sektor lain. Serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha disektor industri masih minim, karena menurut penelitian (Sandhika, 2010) pada variabel jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi terdapat alasan mengapa produktivitas menurun, karena disebabkan adanya kualitas pendidikan masyarakat yang kurang, kualitas SDM yang rendah, dan modal kerja yang minim.

## **UMK**

Untuk variabel upah minimum menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah IKM, yang berarti naik turunnya upah menjadikan pengaruh terhadap jumlah IKM. Jadi menurut penelitian (Widyastuti, 2013) Jumlah Unit Usaha mengalami kenaikan, begitu pula dengan permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah. Demikian halnya dengan nilai upah minimum yang cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya namun permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan di beberapa tahun. Kenaikan Upah Minimum justru mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah (IKM). Naiknya tingkat produktivitas tenaga kerja dapat menaikkan output usaha industri kecil menengah, dengan demikian produsen akan terdorong untuk menambah unit usahanya. Selain itu, permintaan pasar yang tinggi diikuti dengan sektor pariwisata di DIY yang semakin meningkat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel-variabel yang meliputi: PDRB, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap jumlah IKM di DIY dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY. Artinya kenaikan PDRB akan menurunkan jumlah IKM di DIY.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah IKM di DIY. Artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah IKM di DIY.
3. Sedangkan variabel upah minimum diketahui mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah IKM di DIY. Jadi semakin besar upah minimum akan berpengaruh meningkatkan jumlah IKM di DIY.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulann yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat daerahnya dan menggali potensi yang ada di daerah masing-masing kabupaten, sehingga masyarakat akan tergerak untuk berwirausaha. Dengan demikian akan memberikan dampak yang baik pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Serta diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap industri yang sudah mulai berkembang dengan cara pelatihan kewirausahaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pemberian modal kerja. Sehingga industri kecil menengah mampu meningkatkan outpunya dan dapat berkorelasi positif terhadap peningkatan pariwisata di DIY. Seperti di daerah

Gunung Kidul yang memiliki beragam pantai yang indah dan dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi Gunungkidul sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri kecil menengah seperti kerajinan cinderamata sebagai contoh kaos, oleh-oleh makanan khas Gunung Kidul, gantungan kunci, dsb.

2. Pemerintah daerah masing-masing kabupaten diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM melalui Disnakertrans dan Dinas Sosial guna meningkatkan keterampilan masyarakat yang mempunyai potensi dibidang industri secara khusus, dan usaha secara umum sehingga masyarakat yang terdidik tersebut mampu membuka lapangan usaha dibidang IKM. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Sedangkan yang terakhir berkaitan dengan upah minimum, perusahaan diharapkan mampu mensejahterakan para karyawannya melalui upah yang sesuai dengan UMK yang berlaku di daerah masing-masing. Pemerintah dalam hal ini mempunyai wewenang *controlling* terhadap perusahaan yang memberikan upah terhadap karyawannya sehingga perusahaan merasa mempunyai tanggung jawab terhadap kewajibannya. Dengan adanya aturan yang ditaati oleh perusahaan dan fungsi *controlling* dari pemerintah maka akan terjadi loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan diharapkan hasil produksi meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometrics*. New York: Springer.
- BPS. (2013, December 2). Dipetik January 5, 2018, dari BPS DIY: <http://bps.diy.com>
- BPS. (2018). *Konsep Industri mikro dan kecil*. Dipetik 3 2, 2018, dari Konsep Industri mikro dan kecil.
- BPS. (2018). *Konsep PDRB*. Dipetik 3 2, 2018, dari Konsep PDRB: <http://bps.go.id>
- Djalal, N., & Usman, H. (2006). *Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2007). *Ekonomi Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP.AMP.YKPN.
- Lisnawati, I. (2010). Peranan Sektor UKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Peranan Sektor UKM Daerah* , 1-5.
- Maharani, T. (2008). *Peranan Sektor Usaha Kecil Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bogor: IPB.
- Prihatmo, W. (2001). *Analisa Potensi Produk Regional Domestik Bruto di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

- Rosadi, D. (2017). *Analisis Statistik dengan R*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sandhika. (2010). Pengaruh Konglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Pengaruh Konglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* , 1-4.
- Subri, M. (2008). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia Universitas Indonesia.
- Tjiptoherijanto. (1982). *Masalah Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widyastuti. (2013). Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah. *Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah* , 1-6.
- Wiratno, B. (2010). *Analisa Pengaruh Pendapatan Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja di Jawa Tengah*. Semarang: Graha Pustaka.
- Wulandari. (2006). Kategori Industri Kecil Menurut Departemen Perindustrian . *Kategori Industri Kecil Menurut Departemen Perindustrian* , 2-4.